

BAB V

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020 dengan menggunakan metode penelitian regresi data panel. Penelitian ini diolah menggunakan Eviews 9 yang kemudian hasil penelitian telah dijabarkan pada bab IV, sehingga Pembahasan yang didapat sebagai berikut :

A. Pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil pengujian di bab IV menunjukkan bahwa variabel belanja modal menunjukkan ada berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan hasil t-hitung yang lebih kecil dibanding t-tabel dan juga pada nilai probabilitas atau nilai signifikansinya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini yang dilakukan Gustianral dan Serly menyatakan bahwa semakin tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mengidentifikasi kinerja yang buruk. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan

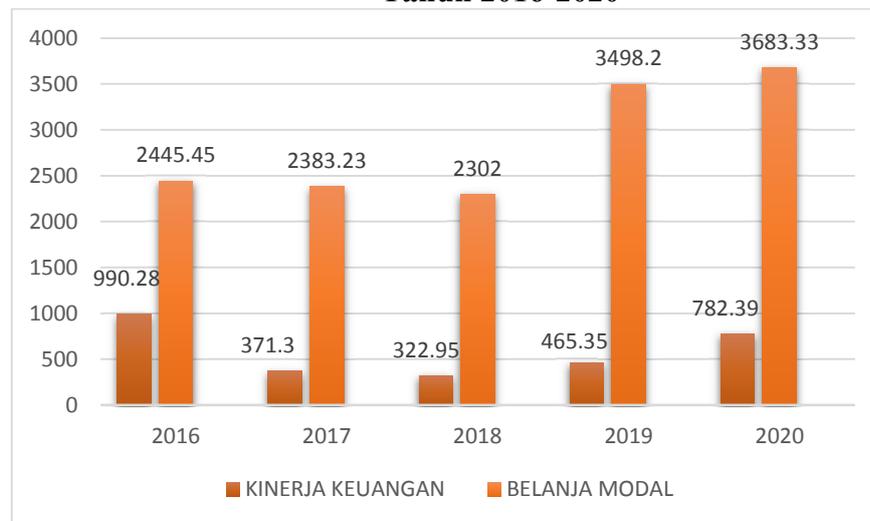
bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.⁷² Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, iritasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Penelitian yang dilakukan Priyan Mardya Kusuma yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. belanja modal berfungsi untuk mengakuisisi, membeli, membuat atau membangun suatu aset tetap yang nantinya akan berguna dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang akan mencerminkan kinerja keuangan. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa adanya belanja modal yang berwujud aset tetap tidak serta menjadikan cerminan bahwa dengan belanja modal yang dapat menjadi cerminan kinerja keuangan yang baik justru malah sebaliknya, belanja modal dapat menjadikan objek pemborosan oleh pemerintah bahkan menjadi sumber praktik dari korupsi. Belanja modal seharusnya dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan pemerintah justru menjadi tidak bermanfaat ketika pemerintah salah sasaran dalam melaksanakan belanja modal yang tidak sesuai dengan daerahnya,

⁷² Vegy Gustianral Dan Vanica Serly “ Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Yang Terdapat Pada Indonesia Governance Indexs Tahun 2014)”, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Hal. 142-144

sehingga tidak terciptanya benefit dan impact kepada daerah tersebut sehingga sulit untuk mencerminkan kinerja keuangan yang baik dalam pemerintah.⁷³

Grafik 5.1
Kinerja Keuangan dan Belanja Modal
Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan grafik 5.1 menunjukkan perkembangan kinerja keuangan (Juta Rupiah) dan Belanja Modal dari tahun 2016-2020 pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 ketika kinerja keuangan 990,28 ketika belanja modal 2445,45 ketika nilai kinerja keuangan 782,39 maka nilai belanja modalnya sebesar 3683,33 sehingga dapat dikatakan dalam jangka panjang dan jangka pendek, bahwa semakin besar kinerja keuangan, maka nilai belanja modal akan menurun dan sebaliknya ketika kinerja keuangan kecil, maka nilai belanja modal akan tinggi.

⁷³ Priyan Mardya Kusuma “Pengaruh Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia”, Hal. 115-118

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut peneliti belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur dikarenakan adanya aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan persyaratan utama pemerintah daerah dalam pelayanan publik, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

B. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi jawa timur

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dilihat tabel t-hitung yang lebih kecil dibanding t-tabel dan juga pada nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Ukuran adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Jika objek tertentu dikaitkan dengan instansi atau organisasi ukuran dapat dilihat secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. Tetapi pengukuran suatu organisasi atau instansi tersebut karena tidak ada tolak ukur yang pasti tentang hal tersebut. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan oprasional yang kemudian akan memudahkan dalam memberikan pelayanan masyarakat yang

memandai. Selain itu kemudahan di bidang oprasional juga akan memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

Penelitian yang dilakukan Nugroho dan Fajar menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan.⁷⁴ bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan ukuran pemerintah daerah yang dalam penelitian ini diprosikan dengan total aset tidak mempengaruhi kinerja keuangan. hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan belum dapat berfungsi dengan baik. Pemerintah daerah yang berukuran besar maka ditandai oleh besarnya jumlah aset daerah, seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk meberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mardiasmo yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan tersebut, Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.⁷⁵

⁷⁴ Nugroho Dan Fajar” Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)”, Tahun 2012

⁷⁵ Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Penerbit Andi, Tahun 2009

Grafik 5.2
Kinerja Keuangan dan Ukuran Pemerintah Daerah
Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada grafik 5.2 menunjukkan perkembangan kinerja keuangan dan ukuran pemerintah daerah tahun 2016-2020 pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 ketika kinerja keuangan senilai 990,28 maka ukuran pemerintah daerah sebesar 1812,17 pada tahun 2019 nilai kinerja keuangan adalah senilai 465,35 dan nilai ukuran pemerintah daerah senilai 1860,46 dan pada tahun 2020 ketika nilai kinerja keuangan sebesar 782,39 maka nilai ukuran pemerintah daerah sebesar 1867,51. Dalam jangka pendek nilai kinerja keuangan mengalami penurunan sedangkan dalam jangka panjang nilai ukuran pemerintah daerah mengalami kenaikan signifikan.

C. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi jawa timur

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dapat dilihat jika t -hitung lebih besar dibanding t -tabel dan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU) dana alokasi khusus (DAK) dan Dana bagi hasil (DBH) adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati yang berpendapat bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.⁷⁶ penelitian yang dilakukan oleh Wenny, C. D yang berpendapat bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan karena

⁷⁶ Julitawati "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh", Jurnal Akuntansi

semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah daerah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan.⁷⁷

Tingkat kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk menjaga ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau dana perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan, hal ini dapat pula menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tersebut tinggi, sehingga lemandirian suatu daerah tersebut menurun.

Grafik 5.3
Kinerja Keuangan dan Dana Perimbangan
Tahun 2016-2020

⁷⁷ Wenny, C. D “ Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”, Jurnal Ilmiah STIE MD



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada grafik 5.3 menunjukkan perkembangan kinerja keuangan dan dana perimbangan dari tahun 2016-2020, pada kabupaten/kota mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 kinerja keuangannya sebesar 782,39 maka dana perimbangan sebesar 4438,83, pada tahun 2016 nilai profitabilitas adalah senilai 990,28 dan nilai dana perimbangan sebesar 4749,61. Dalam jangka panjang profitabilitas mengalami naik turun sehingga mengakibatkan nilai dana perimbangan mengikuti perubahan profitabilitas dengan arah yang berbeda. Sedangkan jangka pendek perubahan nilai dana perimbangan akan mengikuti perubahan profitabilitas.

D. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi jawa timur

Berdasarkan penelitian ini dalam jangka panjang, secara menunjukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. dengan hasil t-hitung lebih besar dari pada t-tabel

begitupun dengan nilai probabiliti lebih besar dibanding nilai signifikannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Madjojo dan Sukartono yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.⁷⁸ akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Jaya Dan Dwiranda yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. peningkatan pendapatan asli daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan. hal ini menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam pemilihan potensi, penggalian, dan pengelolaan potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah serta memaksimalkan penerimaan daerah sehingga menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.⁷⁹

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah yang

⁷⁸ Madjojo Dan Sukartono “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Fypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006-2008”, Vol.6 Tahun 2009

⁷⁹ Jaya Dan Dwiranda “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Hal. 79-92

berdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pendapatan asli daerah yang sah maka menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintah daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan yang semakin baik.

Grafik 5.4
Kinerja Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada grafik 5.4 menunjukkan perkembangan kinerja keuangan dan pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020 pada kabupaten/kota di provinsi jawa timur mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 profitabilitas senilai 782,39 maka nilai pendapatan asli daerah sebesar 3489,27, pada tahun 2016 nilai kinerja keuangan adalah sebesar 990,28 dan nilai pendapatan asli daerah sebesar 2319,72. Dalam jangka panjang dan jangka pendek nilai kinerja keuangan mengalami naik turun sehingga

mengakibatkan nilai pendapatan asli daerah mengikuti perubahan kinerja keuangan dengan arah yang sama.

E. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan pada bab IV diperoleh hasil bahwa variabel Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. dapat dilihat dari koefisien determinasi 17,36%. Sisanya ($100\% - 17,36\% = 82,64\%$) dipengaruhi oleh variabel lainnya serta keluar dari yang diproksikan oleh peneliti.

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan digunakan sebagai masukan untuk kedepannya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam memprediksi kinerja keuangan mengenai 5 variabel meliputi Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh harumiati dan payamta menemukan hasil keempatvariabel bahwa Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020. dapat dilihat dari koefisien determinasi 17,36%.

Sisanya ($100\% - 17,36\% = 82,64\%$) dipengaruhi oleh variabel lainnya serta keluar dari yang diproksikan oleh peneliti.

F. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah melalui tahap pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

- a. Dari hasil penelitian yang menggunakan uji T didapatkan variabel Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2016-2020.
- b. Untuk hasil penelitian dengan menggunakan uji F didapatkan bahwa Variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2016-2020.

2. Implikasi Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan digunakan sebagai masukan kedepannya seperti pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memprediksi Kinerja Keuangan mengenai variabel terhadap Kinerja

Keuangan. Variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2016-2020.